



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ogah terus-terusan rapat dengan Sri Mulyani: Komisi VI minta Presiden angkat wakil menteri BUMN  
Tanggal : Minggu, 30 Juli 2017  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 7

## Ogah Terus-terusan Rapat Dengan Sri Mulyani

# Komisi VI Mintat Presiden Angkat Wakil Menteri BUMN

**Komisi VI frustrasi dengan tak kunjung dicabutnya pencekalan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengikuti segala rapat di DPR. Sebab, gara-gara pencekalan itu, Komisi VI tidak bisa melakukan rapat-rapat penting dengan Rini. Untuk mengatasinya, Komisi VI pun meminta Presiden Jokowi mengangkat Wakil Menteri BUMN.**

PENCEKALAN terhadap Rini dilakukan DPR sejak Desember 2015, yang merupakan rekomendasi Pansus Pelindo II. Sejak saat itu, Rini tak pernah rapat dengan Komisi VI. Segala rapat Menteri BUMN dengan DPR selalu diwakilkan kepada Menteri Keuangan, mulai dari era Bambang Brodjonegoro sampai Sri Mulyani.

Anggota Komisi VI Darmadi Durianto mengaku pihaknya ingin agar pencekalan itu segera dicabut. Sayangnya, Komisi VI tidak berwenang mencabutnya, karena hal itu sebelumnya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR.

"Itu kan surat penceka-

lan harus dicabut di (Rapat) Paripurna. Waktu itu dilarangnya di Paripurna, bukan domain Komisi. Jadi, harus diproses di Paripurna lagi," kata politisi PDIP ini.

Kata dia, penunjukan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Plt Menteri BUMN untuk mengikuti rapat dengan Komisi VI tidak menyelesaikan masalah. Sebab, Menteri Keuangan Sri sering kurang menguasai problem secara di Kementerian BUMN.

"Karena sudah ada surat Presiden menunjuk Menteri Keuangan untuk mewakili, ya secara legal tidak ada masalah. Cuma pembahasan detail saja

bermasalah karena Menkeu tidak keluarkan kebijakan," katanya.

"Kalau hanya sekadar bahan anggaran sih tidak ada masalah. Tapi, yang detail ini kan yang lebih menguasai Menteri BUMN," sambung dia.

Darmadi kemudian memberi contoh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun dan Djakarta Lloyd sebesar Rp 379 miliar dalam RAPBN Perubahan 2017. Dalam membahas itu, tiba-tiba Menteri Keuangan nyelong ke Badan Anggaran (Banggar) DPR tanpa terlebih dulu melalui persetujuan di Komisi VI DPR.

Menurutnya, cara-cara seperti ini cacat prosedural. "Itu langung nyelong ke Banggar. Padahal, harusnya dibahas dulu di komisi VI. Mestinya ini jadi perhatian. Kalau ada koordinasi kongkret antara Menteri (Rini Soemarno) dan DPR mestinya ini tidak terjadi. Ke depan harus lebih hati-hati koordinasinya," katanya.

Darmadi berharap, Presiden segera menyelesaikan masalah ini. Sebab, kehadiran Menteri BUMN langsung ke DPR sangat penting. Banyak kebijakan vital yang harus dibahas langsung. Jika pencabutan cekal terhadap Rini tidak bisa dilakukan, Presiden bisa mengambil opsi menunjuk Wakil Menteri BUMN.

"Presiden harus selesaikan masalah ini. Solusinya adalah memang antara membentuk atau menunjuk Wakil Menteri BUMN. Karena ini kan demikian panjang. Rasanya kurang bagus kalau kemudian kita tidak bisa aktif berdialog dengan Menteri BUMN itu," jelasnya.

Mengenai PMN pada PT KAI dan Djakarta Lloyd, Banggar memutuskan menolak. Banggar meminta agar usulan PMN itu dibahas lebih dulu di Komisi VI. Setelah disetujui, baru dibawa ke Banggar.

Menteri Sri Mulyani yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno pada rapat kerja

dengan Komisi VI pada Kamis malam juga mengakui bahwa mekanisme pengajuan PMN kepada dua BUMN tersebut tidak sesuai dengan aturan DPR. Jika mengacu pada aturan DPR, seharusnya PMN terlebih dahulu diusulkan di Komisi VI dengan Kementerian BUMN dengan catatan Kementerian BUMN melayangkan surat untuk rapat kerja membahas PMN.

"Banggar telah disebutkan postur perubahan, karena PMN di dalam pembiayaan maka ada dua item yang domain Komisi VI, yaitu KAI dan Djakarta Lloyd, tadi ada pembahasan terkait proses, sesudah menyampaikan harusnya segera menyampaikan surat kepada Komisi VI untuk pengajuan. Tadi diklarifikasi supaya tidak menimbulkan persepsi bahwa Banggar sudah setuju, karena harus melakukan pendalamannya kemudian Komisi VI akan memberikan keputusan untuk disampaikan ke Banggar," ucapnya. ■ KAL